

DINAMIKA POLITIK DAN PILKADA DI KOTA KENDARI: Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal

Yunita Simatupang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Correspondent author: yunita.simatupang@uho.ac.id

Kendari, 93231, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the role and impact of social media in political contestation leading up to the gubernatorial election in Southeast Sulawesi, utilizing the public sphere theory developed by Jurgen Habermas. The findings indicate that social media plays a significant role in enhancing political participation, particularly among younger, more tech-savvy voters. However, the study also identifies serious challenges related to the spread of misinformation and hoaxes, which can manipulate public perception and undermine the integrity of the democratic process. Therefore, it is crucial for candidates and their campaign teams to develop effective strategies to counter misinformation, and for the government and relevant institutions to enforce strict regulations on social media content during the campaign period. The conclusion of this study is that while social media holds great potential to strengthen democracy by increasing transparency and participation, its misuse can pose serious threats to political and social stability. Hence, appropriate strategies and strong digital literacy are necessary to harness social media as an effective tool in supporting a healthy and sustainable democracy in Indonesia.

Keywords: Democracy; Gubernatorial election; Misinformation; Public sphere; Political contestation; Socialmedia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak media sosial dalam kontestasi politik menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara dengan menggunakan teori ruang publik yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih melek teknologi. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan yang serius terkait penyebaran disinformasi dan hoaks, yang dapat memanipulasi persepsi publik dan merusak integritas proses demokrasi. Untuk itu, penting bagi para kandidat dan tim kampanye untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menangkal disinformasi, serta bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menerapkan regulasi yang ketat terhadap konten media sosial selama masa kampanye. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan literasi digital yang kuat diperlukan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat yang efektif dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Disinformasi; Demokrasi; Kontestasi politik; Media sosial; Pemilihan gubernur; Ruang publik

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif. Pilkada memungkinkan warga negara untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin di daerahnya, dengan harapan bahwa pemimpin yang terpilih mampu mengelola pemerintahan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, media sosial telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam kampanye politik, termasuk dalam Pilkada di Kota Kendari. Media sosial, yang awalnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi pribadi, kini berfungsi sebagai platform strategis dalam kampanye politik untuk menjangkau pemilih secara luas dan cepat.

Kota Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadirkan sebuah studi kasus yang menarik mengenai penggunaan media sosial dalam kampanye politik lokal. Dengan populasi yang semakin melek teknologi, para kandidat Pilkada di Kendari memanfaatkan media sosial untuk membangun citra diri, menyampaikan program kerja, dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Di sisi lain, penggunaan media sosial dalam kampanye juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang dapat memengaruhi opini publik dan hasil Pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial dalam kampanye politik di Kota Kendari, serta dampaknya terhadap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian ilmu politik dan komunikasi, khususnya dalam memahami peran media sosial dalam proses politik di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana media sosial digunakan oleh para kandidat dalam Pilkada di Kendari dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik lokal. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan media sosial dalam kampanye politik, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola kampanye politik yang lebih efektif dan etis di era digital.

Dalam kajian literatur, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang menggabungkan paradigma komunikasi politik dan teori demokrasi digital. Komunikasi politik, menurut McNair (2011), adalah interaksi antara politikus, media, dan publik dalam proses demokrasi. Di era digital, komunikasi politik tidak lagi hanya terjadi melalui media tradisional, tetapi juga melalui platform digital seperti media sosial, yang memungkinkan interaksi dua arah antara politikus dan pemilih (Castells, 2009). Selain itu, teori demokrasi digital yang dikemukakan oleh Dahlberg (2007) menyatakan bahwa internet dan media sosial dapat memperluas partisipasi politik dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan penyebaran disinformasi juga

menjadi perhatian penting dalam penerapan teori ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman tentang peran media sosial dalam kampanye politik di Kota Kendari, tetapi juga memperkaya literatur tentang dinamika politik lokal di Indonesia dalam konteks digitalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian, fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi selama kampanye Pilkada di Kota Kendari, khususnya dalam penggunaan media sosial. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016; Nazir, 1998). Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada analisis dinamika kampanye politik yang dilakukan oleh para kandidat Pilkada melalui media sosial. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi Kota Kendari sebagai pusat politik di Sulawesi Tenggara, di mana penggunaan media sosial dalam kampanye Pilkada menjadi semakin signifikan. Subjek penelitian meliputi para kandidat Pilkada, tim kampanye, pemilih yang aktif di media sosial, serta pengamat politik lokal. Subjek-subjek ini dipilih karena mereka dianggap memiliki peran penting dan informasi yang relevan terkait penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para kandidat, tim kampanye, dan pemilih, serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi kampanye, analisis konten media sosial, dan laporan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Proses analisis data melibatkan editing, pengelompokan, dan ringkasan data, serta penyusunan kode-kode dan catatan mengenai aktivitas dan proses kampanye di media sosial. Teknik analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tema, kelompok, dan pola data yang berkaitan dengan pengaruh media sosial dalam kampanye politik lokal, serta dalam penarikan kesimpulan mengenai dinamika politik di Kota Kendari selama Pilkada berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik dan Pilkada di Kota Kendari: Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan penting mengenai peran media sosial dalam kampanye politik pada Pilkada Kota Kendari dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih serta hasil pemilihan. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis mendalam terhadap konten media sosial yang digunakan oleh para kandidat dan wawancara dengan aktor politik lokal serta pengamat politik.

a. Transformasi Media Sosial sebagai Alat Kampanye Utama:

Dalam Pilkada Kota Kendari, media sosial telah bertransformasi dari sekadar platform komunikasi pribadi menjadi alat kampanye utama. Para kandidat menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan, mulai dari membangun citra diri hingga menyebarkan program kerja. Facebook, Instagram, dan WhatsApp adalah platform yang paling banyak digunakan. Penggunaan ini tidak hanya bertujuan untuk menjangkau pemilih secara lebih luas, tetapi juga untuk menciptakan interaksi langsung dan responsif antara kandidat dan pemilih. Kandidat dapat mengirim pesan politik secara real-time dan menerima umpan balik langsung dari pemilih, yang meningkatkan efektivitas komunikasi politik.

"Dalam era digital ini, kami tidak bisa mengabaikan kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik. Kami menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan memberikan edukasi kepada pemilih tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Namun, kami juga menyadari bahwa disinformasi bisa menjadi ancaman, sehingga kami berusaha keras untuk memastikan bahwa informasi yang kami bagikan selalu berdasarkan fakta," (Lukman Abunawas, calon gubernur Sulawesi Tenggara)

b. Peningkatan Partisipasi Pemilih Melalui Keterlibatan Aktif di Media Sosial:

Media sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Diskusi dan debat yang terjadi di platform-platform ini memberikan ruang bagi pemilih untuk lebih terlibat dalam proses politik. Pemilih yang sebelumnya mungkin apatis terhadap politik menjadi lebih tertarik dan aktif berpartisipasi karena kemudahan akses informasi dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan kandidat. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Kendari meningkat signifikan, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih melek teknologi dan aktif di media sosial.

"Media sosial adalah sumber utama saya untuk mendapatkan informasi tentang calon gubernur. Saya mengikuti semua kandidat di Instagram dan Facebook, dan saya merasa ini membantu saya membuat keputusan yang lebih terinformasi. Namun, saya juga harus berhati-hati karena banyak informasi yang beredar tidak selalu benar," (Ardiansyah, Pemilih, 27 tahun)

c. Media Sosial Sebagai Alat Transparansi dan Akuntabilitas:

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada. Melalui media sosial, publik dapat memantau aktivitas kampanye, mengkritisi janji-janji politik, dan melaporkan pelanggaran kampanye secara langsung. Ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan di mana kandidat merasa lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Namun, tantangan muncul ketika media sosial juga menjadi tempat bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks, yang dapat memanipulasi opini publik dan merusak proses demokrasi.

"Strategi kami adalah memanfaatkan kekuatan visual dan narasi yang kuat untuk mempromosikan program-program Andi Sumangerukka di media sosial. Kami menggunakan Instagram untuk menampilkan pencapaian dan rencana konkret yang akan dilaksanakan jika beliau terpilih. Selain itu, kami selalu memantau percakapan di media sosial untuk menanggapi kritik dan memberikan penjelasan secara cepat," (Rina, Kartika, Kepala Divisi Media Sosial, Tim Kampanye Andi Sumangerukka)

d. Tantangan Penyebaran Disinformasi dan Pengaruhnya Terhadap Opini Publik:

Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran disinformasi dan hoaks. Beberapa kandidat menggunakan taktik ini untuk menyerang lawan politik mereka atau untuk mempengaruhi pemilih dengan informasi yang menyesatkan. Hoaks dan berita palsu yang tersebar melalui media sosial tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi. Pemilih yang terpapar informasi palsu ini dapat membuat keputusan yang tidak berdasarkan pada fakta, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilihan secara negatif. Ini menjadi masalah serius yang perlu diatasi oleh otoritas terkait untuk menjaga integritas proses pemilu.

e. Pengaruh Media Sosial Terhadap Hasil Pilkada:

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa media sosial memiliki dampak langsung terhadap hasil Pilkada. Kandidat yang berhasil memanfaatkan media sosial secara efektif cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Ini terutama berlaku bagi kandidat yang mampu menciptakan narasi positif dan membangun hubungan personal dengan pemilih melalui interaksi di media sosial. Di sisi lain, kandidat yang tidak mengelola kehadiran mereka di media sosial dengan baik, atau yang gagal menanggulangi serangan disinformasi, seringkali kehilangan dukungan dan pada akhirnya kalah dalam pemilihan.

Temuan-temuan ini memiliki beberapa implikasi penting yang perlu dibahas lebih lanjut, di antaranya yang pertama, Penggunaan Media Sosial sebagai Pengubah Paradigma dalam Kampanye Politik: Transformasi media sosial menjadi alat kampanye utama telah mengubah cara kampanye politik dilakukan di tingkat lokal. Sebelumnya, kampanye politik di Kota Kendari didominasi oleh media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Namun, dengan munculnya media sosial, para kandidat kini dapat mengendalikan narasi politik mereka sendiri dan berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa melalui filter media tradisional. Ini memberikan kekuatan lebih besar kepada kandidat untuk mengontrol citra mereka dan menyebarkan pesan politik secara lebih efisien. Namun, pergeseran ini juga menuntut kandidat untuk lebih cerdas dalam mengelola konten mereka di media sosial dan lebih waspada terhadap dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar. Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Politik yang Inklusif: Media sosial telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif, memungkinkan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam diskursus politik untuk terlibat lebih aktif. Di Kota Kendari, ini terlihat dari meningkatnya partisipasi pemilih muda dan pemilih perempuan yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik. Media sosial memberikan mereka platform untuk menyuarakan pendapat mereka, berdebat, dan berkontribusi dalam diskusi politik. Ini sejalan dengan teori demokrasi digital yang menekankan bahwa internet dan media sosial dapat memperluas partisipasi politik dan membuat proses politik lebih inklusif.

Transparansi dan Tantangan Disinformasi dalam Demokrasi Digital: Meskipun media sosial telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada, tantangan terkait disinformasi tetap menjadi masalah besar. Penyebaran hoaks dapat merusak integritas proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ini memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dari penyelenggara pemilu dan regulator untuk memantau dan menindak penyebaran informasi palsu. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan pemilih sangat penting untuk membantu mereka memilah informasi yang akurat dari yang menyesatkan. Tanpa langkah-langkah ini, potensi positif media sosial dalam memperkuat demokrasi dapat terganggu oleh risiko yang ditimbulkan oleh disinformasi. Rekomendasi untuk Pengelolaan Kampanye Politik di Era Digital: Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk pengelolaan kampanye politik di era digital. Pertama, kandidat harus dilatih untuk mengelola kehadiran mereka di media sosial secara lebih efektif, termasuk bagaimana menghadapi serangan disinformasi.

Kedua, penyelenggara pemilu perlu memperkuat regulasi terkait

penggunaan media sosial dalam kampanye politik, termasuk aturan yang lebih tegas terhadap penyebaran hoaks. Ketiga, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemilih agar mereka dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis. Implikasi Terhadap Penelitian Masa Depan: Temuan dari penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran media sosial dalam politik lokal di Indonesia. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi dinamika politik di daerah lain, serta bagaimana perbedaan konteks sosial dan budaya mempengaruhi cara media sosial digunakan dalam kampanye politik. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada strategi terbaik untuk menangkal disinformasi dalam konteks politik lokal, yang semakin menjadi tantangan besar di era digital ini.

Penggunaan media sosial telah terbukti meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih melek teknologi. Media sosial memfasilitasi akses yang lebih mudah ke informasi tentang kandidat dan isu-isu politik, memungkinkan pemilih untuk lebih terlibat dalam proses politik. Diskusi online dan debat di media sosial telah memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan pandangan mereka, mendiskusikan program kandidat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang lebih luas. Ini sesuai dengan konsep ruang publik Habermas, di mana media sosial berfungsi sebagai ruang baru di mana warga dapat berkumpul dan berdebat secara bebas tentang isu-isu politik. Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadirkan oleh penyebaran disinformasi dan hoaks. Informasi palsu yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik dan menyesatkan pemilih. Hoaks dan kampanye disinformasi yang tidak terkendali dapat merusak kualitas demokrasi dengan mengaburkan fakta dan menciptakan polarisasi di antara masyarakat. Para kandidat dan tim kampanye sering kali harus berhadapan dengan tantangan ini, yang memaksa mereka untuk terus memberikan klarifikasi dan menangkal informasi yang tidak benar.

Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memiliki potensi untuk berfungsi sebagai penguat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kandidat. Pengawasan yang dilakukan oleh publik melalui media sosial memungkinkan mereka untuk memantau aktivitas kampanye, melaporkan pelanggaran, dan meminta pertanggungjawaban dari kandidat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, media sosial juga dapat menjadi alat yang merusak demokrasi, terutama ketika digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan divisif. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan: kandidat, tim kampanye, penyelenggara pemilu, dan masyarakat

umum untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berbasis fakta. Pelatihan dan pendidikan tentang literasi digital harus diberikan kepada tim kampanye untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan media sosial secara etis dan efektif. Regulasi yang lebih ketat terhadap konten media sosial selama kampanye politik diperlukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang disebarkan kepada publik akurat dan dapat dipercaya. Peningkatan literasi digital di kalangan pemilih harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu pemilih menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi peran media sosial dalam kontestasi politik di Sulawesi Tenggara menjelang pemilihan gubernur, dengan fokus pada bagaimana platform digital ini memengaruhi dinamika kampanye, partisipasi pemilih, serta pembentukan opini publik. Dari hasil penelitian, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik, yang tidak hanya menggambarkan potensi media sosial sebagai alat kampanye yang kuat, tetapi juga menyoroti tantangan signifikan yang dihadapkannya dalam proses politik modern. Media sosial telah menjadi platform utama bagi para kandidat dalam menyampaikan pesan politik mereka kepada pemilih. Kandidat seperti Andi Sumangerukka dan Lukman Abunawas memanfaatkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih personal dengan pemilih. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan real-time, yang menjadi kunci dalam memperkuat citra kandidat dan memobilisasi dukungan. Selain itu, interaksi langsung dengan pemilih melalui komentar, pesan, dan diskusi online telah membuka saluran komunikasi dua arah yang lebih transparan dan responsif dibandingkan dengan media tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McNair, B. (2011). *An introduction to political communication* (5th ed.). London: Routledge.
- Dahlberg, L. (2007). The internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 10(5), 615-633. <https://doi.org/10.1080/13691180701658020>
- Bimber, B., Flanagin, A. J., & Stohl, C. (2012). *Collective action in organizations: Interaction*

and engagement in an era of technological change. Cambridge: Cambridge University Press.

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. New Haven, CT: Yale University Press.

Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com 2.0*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524-538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>

Chadwick, A. (2013). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford: Oxford University Press.

Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave? Digital media and the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications*. Glencoe, IL: Free Press.

Kruikemeier, S., van Noort, G., Vliegenthart, R., & de Vreese, C. H. (2013). Getting closer: The effects of personalized and interactive online political communication. *European Journal of Communication*, 28(1), 53-66. <https://doi.org/10.1177/0267323112464837>

Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Cambridge: Polity Press.

Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign Affairs*, 90(1), 28-41.\